

# **PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM**

Penulis :

Dwi Heru Nugroho, S.H., M.H

Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H



**CV. STRATA PERSADA ACADEMIA**

# PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM

Penulis:

**Dwi Heru Nugroho, S.H., M.H**  
**Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H**

Editor:

**Zaid, S.M., M.H**

Desain Cover:

**Riswanda Imawan**

Tata Letak:

**Azmi Asyfia**

Ukuran:

i-iv, 1-93, uk: 15.5x23 cm

ISBN:

**978-623-09-4932-6**

Cetakan Pertama:

**Agustus 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2023**

**by CV. Strata Persada Academia**

All Right Reserved

DILARANG KERAS MENERJEMAHKAN, MEMFOTOKOPI, ATAU MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT.

**PENERBIT:**

**CV. Strata Persada Academia**

Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45183

Website: [www.stratapersada.com](http://www.stratapersada.com)

Instagram: @stratapersada

Email: [admin@stratapersada.com](mailto:admin@stratapersada.com)

# KATA PENGANTAR PENULIS

**A**lhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam"

Sumber daya alam merupakan harta yang tak ternilai bagi sebuah negara, merentang dari kekayaan mineral yang terpendam dalam kerak bumi hingga ke keanekaragaman hayati yang menghiasi alam. Bagaimana negara menjalankan penguasaan terhadap sumber daya alam ini tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi semata, tetapi juga menggambarkan komitmen moral, hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan yang bijak dan berkelanjutan atas sumber daya ini menjadi landasan penting bagi kemajuan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap undang-undang yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sangatlah penting.

Buku ini merupakan sebuah upaya komprehensif untuk memahami dan menggali hukum serta regulasi yang mengatur penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya dalam konteks sektor pertambangan dan energi. Karenanya, buku ini tidak hanya ditujukan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami bagaimana regulasi sektor pertambangan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan didukung oleh referensi yang solid dan pendekatan yang objektif, diharapkan buku ini mampu menjadi panduan berharga yang membuka wawasan lebih luas terhadap kompleksitas penguasaan negara atas sumber daya alam.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi panduan berharga bagi para akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan,

dan semua individu yang peduli terhadap nasib sumber daya alam dan masa depan generasi mendatang. Semoga buku ini menginspirasi perdebatan yang konstruktif dan membantu membentuk visi yang lebih inklusif untuk penguasaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, dan kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan pemahaman tentang penguasaan negara atas sumber daya alam dalam kerangka hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023

Dwi Heru Nugroho

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB 2.....	12
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .....	12
A. Sejarah Perkembangan Peraturan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia .....	12
B. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan .....	25
C. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	29
BAB 3.....	40
PENGUSAHAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM40	
A. Makna Yuridis dan Filosofis dari Terminologi Hak Menguasai Negara (HMN).....	40
B. Teori Pengusahaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam.	43
C. Teori Otonomi Daerah .....	45
D. Pengusahaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Ditinjau Dari Hukum Islam.....	48
BAB 4.....	55
Pemikiran dan Konsep Hak Pengusahaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Undang-undang Dasar 1945 .....	55
BAB 5.....	64
PERWUJUDAN HAK PENGUSAHAAN NEGARA DENGAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .....	64

BAB 6.....	78
PERWUJUDAN HAK PENGUASAAN NEGARA DENGAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	87

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku;**

- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, ed. by Agus Murwanto (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2013.
- CST Kansil and Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Darmodiharjo, Darji, and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 6th edn (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara, Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Dhaniswara K. Harjono, 'Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal', 2012.
- Marsel Selamat, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia, Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah* (Malang: Setara Press, 2018).
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechtar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, 1st edn (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).
- IBR. Supancana dkk., *Pelaksanaan Kerjasama Di Bidang Pertambangan (Mineral Dan Batubara)*, 2008.
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Mertokusumo, Prof. Dr. Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 4th edn (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).
- Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris*, 2nd edn (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2014.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, 2011.
- NM Spelt dan J.B.JM ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Simon Felix Sembiring, *Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan Mengungkap: Karut-Marutnya Implementasi UU Minerba Dan Divestasi Freeport Yang Penuh Jebakan* (Jakarta: Gatra Pustaka, 2019).
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2007).
- Arief Hidayat, 'Negara Hukum Berwatak PANCasila', 2017
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1978)
- Azhari, Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Ipleentasinya Pada Periode Negara Madinah, Dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2010)
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 1st edn (PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

Wingjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 1995.

### **Peraturan Perundangan;**

Indonesia, Lembaran Negara Republik, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011, p. 82

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan*, 1960.

— — —, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan*, 1959.

— — —, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan*, 1959.

— — —, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, 1960.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi* (Indonesia: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2017)

Konstitusi, Mahkamah, *Putusan Perkara 64/PUU-XVIII/2020*, 2021

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*, 2004.

— — —, *Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010*, 2010.

— — —, *Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012*, 2012.

— — —, *Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013*, 2014.

### **Jurnal**

- Koeswahyono, Imam, 'Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Negara Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 38 (2008).
- Kunnu, Andi Bustamin Daeng, 'Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2012).
- Magnar, Kuntana, Inna Junaenah, and Giri Ahmad Taufik, 'Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, Dan UU No. 20/2002)', *Jurnal Konstitusi*, 7 (2010), 111.
- Ahmad, "Hak Menguasai Negara: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berdimensi Transedental", *Jurnal Hukum Resedental Pengembangan dan Penegakan Hukum*, (2015).
- J. Ronald Mawuntu, 'Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi', XX (2012), 11.
- Qomar, Nurul, 'Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, I (2012).
- Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, 12 (2015).
- Dyah Ayu Widowati, Ananda Prima Yurista, et al, "Hak Penguasaan atas Sumber Daya Alam dalam Konsepsi Penjabarannya dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, hal 147, 2019.
- Meray Hendrik Mezak, "Pengaturan Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Studi Perbandingan Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan", *Law Review Volume XI*, Nomor 1, 2011.
- Foster, Sheila R., dan Daniel Bonilla, "The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective", dalam 80 *FORDHAM L. REV.*, 2011.

- Marc Bungenber dan Stephan Hobe (Eds), *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, Switzerland: Springer International Publishing, hal. 1-13, 2015.
- William M-Adam and Martin Mulligan, *Decolonizing Nature: Strategies for Conservation in a Post-colonial Era*, Earthscan Publikations Ltd, London, 2003.
- Agus S Ekomadyo, 2006, Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian, *Journal Itenas*, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006.
- Morris. L Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1992.
- Muhammad Nizar, 'Sumberdana Dalam Kepemilikan Islam (Kepemilikan HArta Dalam Perpektif Islam)', *Jurnal Al-Murabbi*, I (2016).
- Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, *Rechtsvinding* vol 5 no. 3 2016.

### **Artikel;**

- A. Rosyid Al Atok, 'Negara Hukum Indonesia', *Makalah Disampaikan Dalam Kajian Rutin Di Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang Dengan Tema 'Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila'*, 2016.
- Agus Salim, 'Pengusahaan Migas Di Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA', *Www.Esdm.Go.Id*  
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-2-makna-dikuasai-oleh-negara>.
- Ahmad Redi, *Konstitusionalitas UU Minerba 2020*, Webinar Revisi UU Minerba Betulkah Untuk Kepentingan Rakyat Atau Negara ? (Jakarta, 2020).

PT Timah Tbk, 'Jejak Langkah Perusahaan PT Timah', *Mining Industry Indonesia* (Jakarta, 2019).

Shell.co.id, 'History of Shell In Indonesia', *Shell.Co.Id*  
[https://www.shell.co.id/en\\_id/about-us/who-we-are/history-of-shell-in-indonesia.html](https://www.shell.co.id/en_id/about-us/who-we-are/history-of-shell-in-indonesia.html).

Industri.kontan.co.id, 'UU Nomor 3 Tahun 2020 Jadi UU Minerba Yang Baru, Sejumlah Pihak Siap Gugat Ke MK', 2020  
<https://industri.kontan.co.id/news/uu-nomor-3-tahun-2020-jadi-uu-minerba-yang-baru-sejumlah-pihak-siap-gugat-ke-mk>.

Money.kompas.com, 'Ini Poin-Poin Penting Dalam UU Minerba Yang Baru Disahkan', 2020  
<https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all>.

Ahmad Redi, *Konstitusionalitas UUU Minerba 2020*, Webinar Revisi UU Minerba Betulakah Untuk Kepentingan Rakyat Atau Negara ? (Jakarta, 2020).

Arief Hidayat, 'Negara Hukum Berwatak PANCasila', 2017  
Asmawi, *Memahami Konsep Masalah Sebagai Inti Maqasid Al-Syariah* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012)

Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara, Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Dhaniswara K. Harjono, 'Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal', 2012

Gatra, 'Hilirisasi Minerba Punya Landasan Konstitusional Yang Kuat', *Gatra.Com*, 2021  
<[https://www.gatra.com/detail/news/510350/ekonomi/hilirisasi-minerba-punya-landasan-konstitusional-yang-kuat#:~:text="Tujuan hilirisasi dengan demikian adalah,kemakmuran rakyat%2C" ujar Sonny.>](https://www.gatra.com/detail/news/510350/ekonomi/hilirisasi-minerba-punya-landasan-konstitusional-yang-kuat#:~:text=)

Dhuhita Driyah Supapti, *Dialektika Hukum Investasi Nasional*, Paper disampaikan dalam *Dies Natalis Fakultas Hukum, UNNES, Semarang, 2018*.